

DIKOTOMI PEMILIHAN KEPALA DAERAH : DEMOKRASI DAN DINASTI PERSPEKTIF ISLAM

Jujun Jamaludin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: jujunjamaludin88@gmail.com

Received: Maret 2023; Accepted: Mei 2023; Published: Mei 2023

Abstract

Indonesia is a large country and is crowned as the largest archipelagic country in the world. Indonesia consists of various ethnic groups, languages and religions. However, when the local elections take place, different perceptions from the community often arise, issues that often occur include: legal issues, historical issues, and "Syara" religious issues. Political dynasties are not the right system to apply to the State of Indonesia, because the State of Indonesia is not a country with a monarchical system of government that elects leaders based on lineage but democracy or elections. Muslims in Indonesia more easily accept democracy, because democracy is not related to and does not conflict with the rules of Fiqh and Sufism. The purpose of organizing elections is to achieve an orderly and peaceful transition of government leadership, replacement of officials who will represent the interests of the people, implement the principle of people's sovereignty, and implement the principle of citizens' human rights. The process of change in the Regional Head Election will certainly bring positive and negative impacts. The positive impact is that people will be more mature and independent in choosing their future leaders. While the negative impact requires a sizable election fund, prone to commotion and disruption of the bureaucracy in government.

Keywords: *Political Dynasty; Democracy; General Election*

Abstrak

Indonesia merupakan negara besar dan dinobatkan sebagai negara kepulauan terbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Namun Ketika pilkada berlangsung seringkali muncul persepsi yang berbeda dari masyarakat, isu-isu yang sering terjadi diantaranya: Isu hukum, Isu sejarah, dan Isu agama "Syara". Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan. umat Islam di Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf. Tujuan penyelenggaraan pemilu Mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, Pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat, Mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Proses perubahan dalam Pemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dan negative. Dampak positifnya masyarakat akan lebih dewasa dan mandiri dalam memilih calon pemimpinnya. Sedangkan dampak negatif membutuhkan dana pemilu yang cukup besar, rawan keributan dan terganggunya birokrasi dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Dinasti Politik; Demokrasi; Pilkada

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar dan dinobatkan sebagai negara kepulauan terbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" bermakna keberagaman sosial dan budaya yang membentuk satu kesatuan dalam negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati.

Sebagai konsekuensi atas kedudukan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menjalankan prinsip otonomi daerah, "Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintahan pusat sampai pedesaan".¹ Salah satu bentuk perwujudan demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan kebebasan untuk memilih dan dipilih atau sering disebut pesta demokrasi.² Dengan adanya pemilihan umum

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (1945): 1-12.

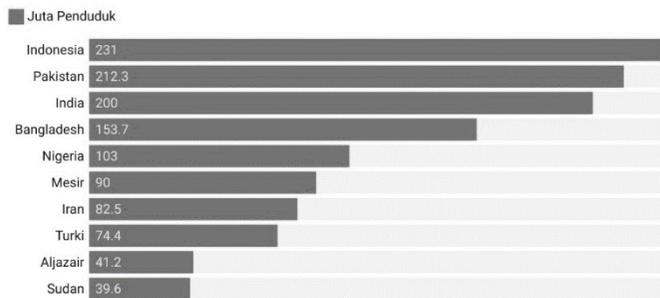
² Muhammad Zulfan Hakim, "DEMOKRASI DALAM PILKADA DI INDONESIA Muhammad Zulfan Hakim," *Universitas Hasanudin*, 2008, 1-12.

sudah barang tentu Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2009: 418) di dalam jurnal (Agus Dedi, 2022) ada empat tujuan penyelenggaraan pemilu, pada dasarnya memberikan gambaran tentang hal-hal sebagai berikut:³ 1)Mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2)Pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3)Mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4)Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Namun Ketika pilkada berlangsung seringkali muncul persepsi yang berbeda dari masyarakat, isu-isu yang sering terjadi diantaranya: 1)Isu hukum, 2)Isu sejarah, 3)Isu agama “Syara” dan sebagainya. Hal ini sulit untuk dihindari karena tatanan negara kesatuan republic indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh aturan barat, Budaya lokal dan Agama Islam, apalagi penduduk Indonesia yang beragama islam mendominasi paling banyak yaitu 86,7%.

Negara Dengan Jumlah Penduduk Muslim Terbanyak



Sumber: cnbcindonesia.com⁴

Pemahaman ini sebaiknya terus disampaikan secara berulang pada masyarakat, dimana kebebasan seseorang untuk memilih dan dipilih merupakan hak tanpa membenturkan dengan urusan sosial, budaya dan agama sekalipun. Dalam undang-undang, para ahli dan cita-cita para pendiri bangsa ini sudah menjelaskan secara gamblang sistem pemerintahan Republik Indonesia “Demokrasi” namun pada prakteknya tidak terlepas dari politik dinasti sebut saja perebutan kekuasaan meneruskan tradisi lama atau para pendahulu orang tuanya. Untuk itu agar tidak terjadi kesalahpahaman terutama dimasyarakat luas yang tidak memiliki peran atau bukan sebagai politisi, bagaimana menyikapi fenomena yang terjadi terutama pada saat pilkada berlangsung jika ditinjau dari perspektif islam sebagai penganut agama terbanyak di indonesia.

³ Agus Dedi, “Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi,” *Jurnal MODERAT* 8, no. 1 (2022): 92–101.

⁴ cnbcindonesia.com, “Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa,” CNBC Indonesia, 2023, [https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa#:~:text=Indonesia memiliki 86%2C7%25%20penduduk,96%2C5%25%20penduduk Muslim.](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa#:~:text=Indonesia%20memiliki%2086%2C7%25%20penduduk,96%2C5%25%20penduduk%20Muslim.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti Politik Terhadap Pilkada Dalam Perspektif Islam

Dinasti Politik merupakan suatu kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik mirip dengan jaman kerajaan Indonesia di masa lampau, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak dan seterusnya secara berkelanjutan. Dengan maksud dan tujuan agar kekuasaan akan tetap berada di lingkungan keluarga tidak beralih pada orang lain.⁵

Dalam perspektif islam tidak ada aturan baku atau penjelasan secara detail mengenai perilaku politik dalam bernegara, kemudian jika dilihat dari sejarah islam sendiri mengenai dinasti politik tidak ada perintah ataupun larangan secara signifikan. Meskipun demikian bukan berarti islam tidak memiliki dasar mengenai pengaturan terhadap ketatanegaraan yang penting memiliki pengetahuan yang luas dan tubuh yang perkasa (sehat jasmani), Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 247:⁶

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۗ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) menjawab, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik.” Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Selain itu seorang pemimpin harus Amanah dan adil seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Annisa ayat 58-59:⁷

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah

⁵ Mahkamah Konstitusi, “Pengertian Politik Dinasti,” Berita Media, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.

⁶ Kemenag, “Qur’an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁷ Kemenag.

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Sebagian orang berpendapat bahwa dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan dengan baik. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.⁸

Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik diantaranya:⁹

1)Adanya keinginan dalam diri maupun lingkungan keluarga untuk memegang kekuasaan dengan maksud serta tujuan sebagai penerus; 2)Adanya kelompok tertentu yang terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok; 3)Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politik; 4)Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI.

Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan, siapapun bisa ikut andil dalam pemilu atau yang disebut dengan pesta demokrasi. Dengan pernyataan demikian tentunya tidak bertentangan dengan ajaran islam sebab tidak ada ketentuan perintah ataupun larangan terkait dinasti politik.

⁸ Imroatun Nika, "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020)," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 562–77, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art9>.

⁹ Alvina Alya Rahma et al., "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–69.

Demokrasi Terhadap Pilkada Dalam Perspektif Islam

Demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan ditangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sepenuhnya diprioritaskan untuk rakyat. kini telah menjadi isu yang bergeser menjadi dari rakyat, oleh penguasa, dan untuk pengusaha, sebab rakyat seperti dijadikan objek untuk mencapai kekuasaan semata. Rakyat kini justru kehilangan hak-hak dasarnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yaitu Sebagai pemegang kedaulatan, partisipasi rakyat seharusnya tidak terhenti hanya dalam bilik suara. Lebih dari itu, dalam setiap tahapan kehidupan bernegara dalam skala apa pun, rakyat memiliki hak dan juga kewajiban untuk berpartisipasi. Dinamika kehidupan demokrasi secara esensial terletak dalam partisipasi yang lebih luas dan menyeluruh.¹⁰

Demokrasi memiliki kecenderungan yang sama dalam hal prinsip-prinsip yang dianut. Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, antara lain:¹¹ 1) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik, Keputusan politik merupakan keputusan yang mengikat dan bersangkutan dengan masyarakat umum, maka dari itu dalam pembuatan keputusan bukan hanya berdasarkan segelintir orang semata namun dibutuhkan berbagai pihak. Misalnya Ketika pemerintah (eksekutif) membuat undang-undang atau peraturan, wajib meminta persetujuan rakyat secara umum yang diwakili oleh DPR (legislatif); 2) Persamaan diantara warga Negara, Sebagai warga negara yang berada di negara demokrasi memiliki hak memilih dan dipilih, tanpa membedakan RAS atau golongan tertentu. Dengan kata lain ini menunjukkan kebebasan dalam bermasyarakat dan bernegara antara calon pemimpin dan yang akan dipimpin. Ketika pilkada berlangsung siapapun yang terpilih itu merupakan final atau hasil yang harus diterima oleh seluruh jajaran masyarakat; 3) Supremasi Hukum, Setiap keputusan atau peraturan yang berlangsung semua elemen masyarakat harus mendukung atau menghormati hukum, penghormatan disini bukan hanya dalam pembuatannya semata tapi bentuk ketaatan yang diimplementasikan dengan tingkah atau perbuatan baik secara keharusan maupun larangan; 3) Pemilu berkala, Pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan yang patut dijaga dalam pelaksanaannya, kompetisi dalam pemilu setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai kandidat perwakilan baik di eksekutif maupun legislatif. Kegiatan pemilu berkala artinya memberi kesempatan pada warga masyarakat untuk ikut andil dalam pesta demokrasi baik sebagai pemilih maupun yang akan dipilih.

Kemudian untuk mencapai tujuan sebagai bentuk perjuangan dalam mempertahankan tradisi atau kebiasaan tersebut, diantaranya:¹² 1) Memperkuat kesadaran masyarakat tentang demokrasi kerakyatan,

¹⁰ Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi."

¹¹ Agus Dedi.

¹² Agus Dedi.

Pendidikan politik dan demokrasi kerakyatan merupakan salah satu bentuk realisasi untuk mencapai tujuan politik dan demokrasi itu sendiri. Anggapan negatif dari masyarakat terkait oknum politik yang terjadi pada setiap generasi menjadi dilema atau trauma tersendiri bagi masyarakat sebagai bagian dari objek dalam tatanan kenegaraan, misalnya korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Meskipun tragedi ini terus terjadi berkesinambungan namun pemahaman harus terus diberdayakan. Jika dilihat dari sudut sempit “negara lebih baik dipimpin oleh orang jahat daripada tidak ada pemimpin sama sekali”.¹³ Maksudnya adalah bukan berarti negara akan lebih baik dipimpin oleh orang jahat, tetapi jika negara tidak ada pemimpinnya kemungkinan kedudukan kekuasaan akan diambil alih oleh pihak luar (penjajahan); 2)Optimalisasi peranan pers sebagai penggalang opini, Keberadaan masyarakat yang kritis, mahasiswa, wartawan LSM dan ormas lainnya merupakan sosok penting dalam pembangunan nasional. Pro dan kontra terhadap pemerintah itu hal yang lazim selama berada pada batasan-batasan tertentu; dan 3)Menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, Tujuan dibentuk hukum adalah untuk mengatur, melindungi, melarang, menyuruh dan sebagainya. Realisasinya harus bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat secara aman, nyaman dan bisa diandalkan sebagai media untuk mencapai keadilan.

Dalam pandangan islam demokrasi tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Syura ayat 38 yang membahas tentang musyawarah:¹⁴

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Artinya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Kemudian demokrasi juga tercatum dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8 yang membahas tentang keadilan:¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰعْدِلُوْا هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

¹³ Fauzan Ali Rasyid and Moh. Dulkiyah, “Political Will Implementation of The Government in Hope Family Program Policy,” *Journal of Governance* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7597>.

¹⁴ Kemenag, “Qur’an Kemenag.”

¹⁵ Kemenag.

Lalu demokrasi juga tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 membahas tentang persamaan:¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Menurut (Fauzan, 2008) umat Islam di Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf.¹⁷ Ini artinya bahwa demokrasi diterima dan sangat diharapkan oleh masyarakat islam ataupun secara umum.

Pilkada Di Indonesia

Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipilih langsung oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin di wilayahnya. Proses pilkada di Indonesia sejak reformasi menandakan era baru, karena masyarakat diberi kebebasan langsung untuk memilih calon pemimpinnya. Antusias masyarakat terhadap pilkada cukup tinggi, meskipun kepercayaan terhadap pemimpin daerah secara keseluruhan menurun drastis. Kepercayaan politik yang diberikan pemilih dalam pilkada agar penyelenggara negara menjalankan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁸

Pemilihan Kepala Daerah dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya:¹⁹ 1)Adanya pengakuan hak pilih secara keseluruhan, tidak membedakan antara pemilih dan yang dipilih semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama; 2)Adanya wadah atau jalan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pemilih sehingga masyarakat memiliki kesempatan pilihan saluran aspirasi politiknya; 3)Tersedia peraturan rekrutmen politik yang demokratis sesuai dengan harapan; 4)Adanya kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, Setiap warga negara yang memiliki hak pilih tidak ada intimidasi, diskriminasi, ancaman atau sejenisnya sehingga dalam proses pelaksanaan berjalan secara jujur dan adil; 5)Adanya

¹⁶ Kemenag.

¹⁷ Fauzan A L I Rasyid, "Politik Islam Dan Demokrasi Di Indonesia," *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 9, no. 2 (2008): 75–86.

¹⁸ Suyatno Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.

¹⁹ Hakim, "DEMOKRASI DALAM PILKADA DI INDONESIA Muhammad Zulfan Hakim."

panitia pemilih yang independen, tidak ada unsur kedekatan yang memihak salah satu calon yang akan dipilih; 6) Adanya keleluasaan kontestan untuk berkompetisi secara sehat; 7) Penghitungan suara yang jujur, tidak ada kecurangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam perspektif pemilihan Kepala Daerah, juga tidak dapat terhindar dari situasi transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia, karena Pemilihan Kepala Daerah secara langsung baru dimulai setelah perubahan UUD 1945. Pemilihan Kepala Daerah yang semula dipilih melalui prinsip perwakilan dipilih melalui prinsip perwakilan (DPRD) dan berubah menjadi pemilihan langsung. Menurut Almond (1974) dalam tulisan Fauzan Ali Rasyid, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain: pendidikan tinggi, status sosial-ekonomi, dan keanggotaan dalam partai politik.²⁰

Proses perubahan dalam Pemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dan negative. Dampak positifnya masyarakat akan lebih dewasa karena memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri. Terlepas dari hal tersebut tentu ada dampak negatif juga yang tumbuh diantaranya membutuhkan dana pemilu yang cukup besar, menjadi pemicu perpecahan diantara pemilih yang berbeda pilihannya, terganggunya birokrasi selama pilkada berlangsung dan sebagainya.

PENUTUP

Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan, siapapun bisa ikut andil dalam pemilu atau yang disebut dengan pesta demokrasi.

Demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan ditangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sepenuhnya diprioritaskan untuk rakyat. umat Islam di Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf.²¹ Ini artinya bahwa demokrasi diterima dan sangat diharapkan oleh masyarakat islam ataupun secara umum.

Proses perubahan dalam Pemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dan negative. Dampak positifnya masyarakat akan lebih dewasa karena memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri. sedangkan dampak negatif diantaranya membutuhkan dana pemilu yang cukup besar, menjadi pemicu perpecahan diantara pemilih yang berbeda pilihannya, terganggunya birokrasi selama pilkada berlangsung dan sebagainya.

²⁰ Fauzan Ali Rasyid, "Kampanye Politik Dan Persoalan Bangsa," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 25, no. 2 (2009): 109-17.

²¹ Fauzan A L I Rasyid, "Politik Islam Dan Demokrasi Di Indonesia," *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 9, no. 2 (2008): 75-86.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dedi. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal MODERAT* 8, no. 1 (2022): 92–101.
- cnbc indonesia.com. "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa." CNBC Indonesia, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa#:~:text=Indonesia memiliki 86%2C7%25 penduduk,96%2C5%25 penduduk Muslim.>
- Hakim, Muhammad Zulfan. "DEMOKRASI DALAM PILKADA DI INDONESIA Muhammad Zulfan Hakim." *Universitas Hasanudin*, 2008, 1–12.
- Kemenag. "Qur'an Kemenag," 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Mahkamah Konstitusi. "Pengertian Politik Dinasti." *Berita Media*, 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.
- Nika, Imroatun. "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020)." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 562–77. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art9>.
- Rahma, Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, and Rana Gustian Nugraha. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–69.
- Rasyid, Fauzan A L I. "Politik Islam Dan Demokrasi Di Indonesia." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 9, no. 2 (2008): 75–86.
- Rasyid, Fauzan Ali. "Kampanye Politik Dan Persoalan Bangsa." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 25, no. 2 (2009): 109–17.
- Rasyid, Fauzan Ali, and Moh. Dulkiyah. "Political Will Implementation of The Government in Hope Family Program Policy." *Journal of Governance* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7597>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (1945): 1–12.
- Suyatno, Suyatno. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.